



# Sekolah Sudah 100% Normal

## ■ Peran Satgas Covid-19 Dialihkan ke UKS

**Sekolah tetap menerapkan proses dan pembiasaan hidup sehat seperti program UKS.**

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pencabutan ini menyusul terkendalinya kasus Covid-19 di Tanah Air. Namun demikian, di sekolah jenjang SMA/SMK, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY tetap mempertahankan peran Satgas Covid-19 dengan dialihkan ke Unit Kesehatan

Sekolah atau UKS. "Judulnya bukan Satgas ya, artinya sekarang diambil alih UKS di masing-masing sekolah," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, Rabu (4/1). UKS juga perlu mengawal kegiatan pembelajaran. Jika menemukan siswa dengan gejala Covid-19 maka diminta untuk izin sementara waktu guna menyembuhkan diri.

• ke halaman 11

### Sekolah Sudah

• Sambutan Hal 1

Didik memastikan bahwa saat ini sudah tidak dilakukan pembatasan di dalam ruang kelas. Aktivitas pembelajaran pun sudah secara penuh atau 100% kembali seperti sebelum Covid-19 yakni melalui metode tatap muka. Termasuk dengan penyelenggaraan ekstrakurikuler seperti sedia kala. Fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan juga masih dipertahankan. Misalnya seperti wastafel, sabun cuci tangan, dan alat pendeteksi suhu tubuh.

"Fasilitas itu tidak perlu dihilangkan agar kebiasaan itu tetap harus tumbuh," bebanya.

Meski pembelajaran sudah bisa dilakukan secara penuh, Didik menganjurkan agar para siswa maupun tenaga pengajar tetap mengenakan masker di sekolah. Sebab pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang dan penularan masih berpotensi terjadi.

"Sekolah tetap menerapkan proses dan pembiasaan hidup sehat seperti program UKS pada masing-masing sekolah kita jalankan. Pembiasaan cuci tangan dan pakai masker tetap kita ja-

lankan seperti biasa. Karena per kelas sudah 36 siswa per rombel," kata Didik. (tro)

### Tetap tracing

Terpisah. Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji memastikan upaya penanganan Covid-19 di daerah masih terus berlangsung.

Di antaranya melakukan surveilans seperti tracing kontak erat pada pasien positif serta mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan secara mandiri bila mengalami gejala Covid-19.

"Pembatasan memang di-longgarkan tapi upaya penanganannya masih sama. Sekarang memang penemuan kasus didominasi dari periksa mandiri. Kita melakukan tracing jika kondisinya kalau ada kluster saja dan itu sudah jarang," kata Aji, kemarin.

Aji mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia termasuk DIY tergolong melandai. Persentase masyarakat yang mendapatkan vaksin Covid-19 pun juga tergolong tinggi, sehingga kekebalan komunal disimpulkan sudah semakin baik. Selain itu, sebelumnya telah dilakukan relaksasi dalam penerapan PPKM. Langkah itu dianggap cukup berhasil karena tidak menimbulkan lonjakan kasus. Hal inilah yang menjadi alasan kuat PPKM dihentikan.

Aji menjelaskan, penghentian PPKM tidak berarti seluruh urusan berkaitan dengan Covid-19 berakhir. Penghentian ini bukan semata ditinggi dengan berubahnya status pandemi menjadi endemi.

Karena untuk beralih ke status endemi, masih harus menunggu pernyataan hasil evaluasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

"Jadi jangan kemudian abai dari sisi penggunaan masker, cuci tangan itu sudah jadi kebiasaan baik. Bukan hanya covid kok penyakit-penyakit lain juga bisa kita tangulangi dengan cara itu," jelas

Lebih jauh, Aji mengatakan, Pemda DIY hingga saat ini masih menunggu aturan tertulis dari Kemendagri terkait penghentian PPKM. Apabila pada level daerah diperlukan regulasi tambahan, maka akan segera diatur oleh Gubernur DIY. Menurutrnya, Instruksi Mendagri kemungkinan akan diterima pekan depan.

Aji pun memastikan bahwa perawatan pasien Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi masih ditanggung pemerintah. "Penanganan Covid-19 ini masih diintervensi pemerintah, termasuk pengobatan di rumah sakit. Jadi yang diti-

langkan adalah PPKM-nya, pembatasan-pembatasan-nya saja. Seperti Peduli Lindung dan sebagainya masih dilakukan," ungkap Aji

### Periapan transisi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan persiapan untuk transisi dari pandemi ke endemi Covid-19. Kebijakan itu tertuang dalam program strategis untuk 2023.

"Antara lain dengan meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan," kata Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, Rabu (4/1).

Ia mengatakan, peningkatan faskes sangat vital untuk upaya penanggulangan COVID-19. Termasuk memperluas jangkauan layanan kesehatan pada masyarakat. Faskes yang rencananya akan dibangun adalah laboratorium kesehatan di Siraman, Wonosari. Keberadaan lab dinilai akan mendukung penanganan 3T (testing, tracing, treatment) Covid-19.

"Kemudian akan dibangun pula gedung rawat inap di RSUD Saptosari," ungkap Sri

Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyatakan kesiapan wilayahnya menuju endemi Covid-19. Meski begitu, ia berharap warganya tetap menerapkan protokol kesehatan. (tro/abx)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005